

**PERBANDINGAN KONSEP PERWALIAN
MENURUT HUKUM PERDATA BARAT
DAN HUKUM PERDATA ISLAM**

T E S I S

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**MUHAMAD RIDWAN
NIM : 14136410001**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SYEKH NURJATICIREBON
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

T E S I S

**PERBANDINGAN KONSEP PERWALIAN
MENURUT HUKUM PERDATA BARAT
DAN HUKUM PERDATA ISLAM**

Oleh :

**MUHAMAD RIDWAN
NIM : 14136410001**

Telah disetujui pada tanggal 13 September 2018

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Asmuni, M.A.
NIP. 19581109 198603 1 006

Pembimbing II,



Dr. H. Wasman, M.Ag.
NIP. 19590107 199201 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD RIDWAN**

NIM : 14136410001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa TESIS yang berjudul: “*Perbandingan Konsep Perwalian menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam*” secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pernyataan ini dibuat dengan sejurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin terjadi, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



MUHAMAD RIDWAN

Dr. H. Ahmad Asmuni, M.A.
Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 eksemplar
Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di Cirebon

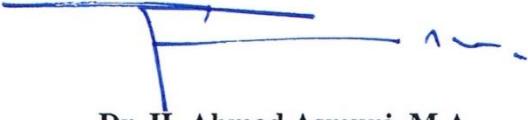
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Muhammad Ridwan NIM. 1413610001 yang berjudul: “*Perbandingan Konsep Perwalian menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam*” telah layak dianggap untuk diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 13 September 2018

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Asmuni, M.A.
NIP. 19581109 198603 1 006

Dr. H. Wasman, M.Ag.

Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di Cirebon

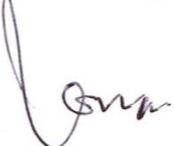
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Muhammad Ridwan NIM. 14136410001 yang berjudul: "*Perbandingan Konsep Perwalian menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam*" telah layak dianggap untuk diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 13 September 2018

Pembimbing II,



Dr. H. Wasman, M.Ag.
NIP. 19590107 199201 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

PERBANDINGAN KONSEP PERWALIAN MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM PERDATA ISLAM

Disusun oleh:

MUHAMAD RIDWAN
NIM : 14136410001

Telah diujikan pada tanggal 10 September 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Cirebon, 13 September 2018

Dewan Pengaji

Ketua/Anggota,

Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.
NIP. 19680408 199403 1 003

Pengaji I,

Dr. H. Ahmad Asmuni, M.A.
NIP. 19581109 198603 1 006

Sekretaris/Anggota ,

Dr. Amin Basir, M.A.
NIP. 19690715 200701 1 013

Pengaji II,

Dr. H. Wasman, M.Ag.
NIP. 19590107 199201 1 001

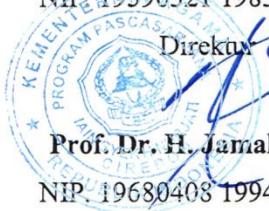
Pengaji Utama

Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

NIP. 19590321 198303 1 002

Direktur

Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag
NIP. 19680408 199403 1 003



ABSTRAKS

MUHAMAD RIDWAN

Perbandingan Konsep Perwalian menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam

Perwalian adalah salah satu permasalahan yang penting di kalangan masyarakat Indonesia yang bertumpu pada hukum yang mengatur hubungan antara perorangan yang disebut dengan hukum perdata, dengan melihat pertumbuhan kasus-kasus penemuan bayi yang tidak memiliki orang tua, tentunya hukum yang berkaitan dan mengatur hal-hal tersebut harus tersusun dengan rapi agar dapat menyelesaikan hal-hal tersebut, walaupun di negara Indonesia sudah ada aturan tersendiri, namun penulis merasa masih perlu diadakan penelitian hukum dengan membandingkan aturan yang baru dengan aturan yang lama, agar penulis dapat mengetahui apakah aturan yang berlaku sekarang memiliki nilai tambah dari aturan sebelumnya atau sebaliknya.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melihat obyek yang dibahas dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas serta menyesuaikannya dengan dasar-dasar hukum perwalian yang terdapat dalam alQuran dan Hadist dalam sebuah perbandingan.

Setelah mengadakan penelitian terhadap konsep perwalian dalam perspektif hukum perdata barat yaitu KUH Perdata (BW) dan hukum perdata Islam yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa hukum perdata barat lebih luas mengatur ketentuan tentang perwalian jika dibandingkan dengan hukum perdata Islam akan tetapi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam penulisan tesis ini dikategorikan sebagai hukum perdata Islam lebih sesuai dengan ideologi negara Indonesia yakni Pancasila, yang memuat ketentuan untuk menghormati agama dan kepercayaan anak yang berada dalam perwaliannya serta Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa wali tidak hanya memberikan pendidikan melainkan juga bimbingan agama yang mencerminkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang kemudian perbedaan konsep kedua hukum tersebut penulis bedakan ke dalam enam bagian, yakni 1) mengenai ketentuan umur, 2) pengangkatan wali, 3) kewajiban wali terhadap diri anak, 4) kewajiban wali terhadap harta anak, 5) ketentuan perwalian terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, dan 6) ketentuan tentang perwalian pengawas, perwalian oleh perkumpulan, yayasan dan lembaga sosial, 7) wali nikah.

ABSTRACT

MUHAMAD RIDWAN. Comparison of Trusteeship Concepts according to Western Civil Law and Islamic Civil Law

Trusteeship is one of the important issues among the Indonesian people which rests on the law that regulates the relationship between individuals called civil law, by looking at the growth of cases of discovery of babies who do not have parents, of course the law relating to and regulating these matters must be neatly arranged in order to solve these things, even though in Indonesia there are already separate rules, but the authors feel that there is still a need for legal research to compare the new rules with the old rules, so that the author can find out if the current rules have a value added from the previous rules or vice versa.

In answering these problems, the author uses a normative juridical approach, namely looking at objects discussed from the point of view of legislation and positive Indonesian law. This research is classified as library research, data is collected by quoting, adapting and analyzing some literature that has relevance to the issues discussed and adjusting them to the basics of guardianship law contained in the Qur'an and Hadith in a comparison.

After conducting research on the concept of guardianship in the perspective of western civil law namely the Civil Code (BW) and Islamic civil law, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law conclusions can be drawn which shows that western civil law broadly regulates concerning guardianship compared to Islamic civil law but the Republic of Indonesia Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which in the writing of this thesis is categorized as Islamic civil law is more in line with the Indonesian state ideology of Pancasila, which contains provisions to respect children's religion and beliefs be in his trusteeship as well as the Compilation of Islamic Law which contains provisions that the guardian not only provides education but also religious guidance that reflects the first principle of Pancasila which is the Godhead of the One who then the difference between the two concepts of the law differentiates into six part, namely 1) regarding the provisions of age, 2) appointment of guardian, 3) obligation of guardian to the child, 4) obligation of guardian to child property, 5) guardianship provisions for children born outside of marriage, and 6) provisions on guardianship guardianship, guardianship by associations, foundations and social institutions, 7) marriage guardians.

الملخص

محمد رضوان

مقارنة مفاهيم الولاية وفقاً للقانون المدني الغربي

والقانون المدني الإسلامي

الولاية هي واحدة من القضايا الهمة بين الشعب الإندونيسي التي تستند إلى القانون الذي ينظم العلاقة بين الأفراد و هو يسمى القانون المدني. اطلع على حالات اختراع الأطفال ليس لديهم أحد الوالدين، بالطبع القانونية المتعلقة والمنتظمة مثل هذه الأمور يجب أن ترتبت بعناية من أجل حل هذه المسائل. في إندونيسيا ، توجد بالفعل قواعد منفصلة حول هذا. لكن المؤلف يشعر أنه لا يزال بمقداره إلى إجراء بحث قانوني من خلال مقارنة القواعد الجديدة بالقواعد القديمة. يريد المؤلف معرفة ما إذا كانت القواعد الحالية قد أضافت قيمة من القواعد السابقة أو العكس.

في الإجابة على هذه المشاكل ، يستخدم المؤلف مقارنة قانونية معيارية ، وهي النظر في الموضوعات التي نوقشت من وجهة نظر التشريع والقانون الإندونيسي الإيجابي. ويصنف هذا البحث عن بحوث المكتبة، وقد تم جمع البيانات عن طريق نقل و تكييف ، وتحليل بعض الكتابات التي لديها صلة القضايا التي تمت مناقشتها، وتكييفها مع أساسيات من قوانين الوصاية الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وفي المقارنة.

بعد إجراء المؤلف البحث على مفهوم الوصاية في منظور القانون المدني الغربية وهي القانون المدني (BW) والقانون المدني في الإسلام، وقانون جمهورية إندونيسيا رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج و تجميع الشريعة الإسلامية، فإنه يمكن استنتاج أن القانون المدني الغرب أوسع في تنظيم الأحكام المتعلقة بالوصاية مقارنةً بالقانون المدني الإسلامي. ولكن قانون جمهورية إندونيسيا رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج، وهو في هذه الأطروحة يصنف باعتباره القانون المدني الإسلامي، أكثر انسجاماً مع أيديولوجية الدولة الاندونيسية البانشاسيلا. يحتوي ذلك القانون على أحكام لاحترام دين و معتقدات الأطفال في وصيتيهم. في حين أن مجموعة الشريعة الإسلامية تحتوي على حكم ينص على أن ولـي الأمر لا يوفر التعليم فحسب ، بل أيضـاً التوجيه الديني الذي يعكس المبدأ الأول للبنكاسيلا ، ألا وهو الإله الواحد.

يقسم المؤلف الاختلافات بين القانونين إلى ستة أقسام، وهي ١) الأحكام المتعلقة بالعمر، ٢) تعين الولي، ٣) واجبات ولـي الأمر للطفل، ٤) واجبات ولـي الأمر الممتلكات أو الأطفال، ٥) أحكام الولاية للطفل ولـدـوا خارج الزواج ، و ٦) الأحكام المتعلقة بالولاية على الأمانة ، والولاية من قبل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية ، و ٧) الولاية في النكاح.

ومن المتوقع، يمكن اعتبار نتائج البحث من قبل المؤلف قدماً في إقرار القانون المدني في المستقبل، ولا سيما في مجالات الولاية.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul: “ *Perbandingan Konsep Perwalian menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam* ”. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua dan segenap keluarga yang dengan kesabarannya menanti akhir studi.
2. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati (Institut Agama Islam Negeri) Cirebon.
3. Bapak Praf. Dr. H. Jamali, M.Ag. Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag. Dosen Penguji Utama
5. Bapak Dr. H. Ahmad Asmuni, M.A. Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Dr. H. Wasman, M.Ag., Dosen Pembimbing II.

7. Civitas Akademika Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis.

Penulis menyadari sepenuhnya, walau dengan segala daya dan upaya yang telah penulis usahakan semaksimal mungkin, namun segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis sangat berterimakasih dan terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, semoga amal baik bapak/ibu/saudara/I yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin.

Cirebon, 13 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
NOTA DINAS	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
BIODATA PENULIS	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian.....	11
BAB II : LANDASAN TEORI PERWALIAN.....	14
A. Pengertian Wali	14
B. Sumber Hukum Wali 26	
1. Sumber Hukum Perdata Barat	26
2. Sumber Hukum Perdata Islam	26
C. Macam-macam Wal.....	28
BAB III : LANDASAN HUKUM PERWALIAN.....	49
A. Landasan Menurut Syariat.....	52
B. Landasan Menurut KHI dan UU No 1 Tahun 1974	55

C.	Landasan Menurut KUHPPerdata.....	57
D.	Landasan Menurut Hukum Adat	59
E.	Landasan Menurut Al-Qur'an.....	68
F.	Landasan Menurut Hadist.....	82
BAB IV	: PERBANDINGAN HUKUM	85
A.	Kelebihan dan kekurangan Hukum Barat tentang Perwalian	85
B.	Kelebihan dan Kekurangannya Hukum Islam tentang Perwalian	94
C.	Persamaan dan Perbedaan Konsep Perwaliaan.....	102
D.	Analisis Perbandingan	111
BAB V	:PENUTUP	140
A.	Kesimpulan	134
B.	Saran-saran.....	146

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998, tentang transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Alif	-	tidak diambahkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
س	Sa'	s	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	-
ه	Ha	h	h dengan titik di bawahnya
خ	kha	kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di bawahnya
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
سـ	Sin	S	-
ـشـ	Syin	sy	-

ص	sad	s	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	d	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain		(koma) terbalik
غ	gain	g	-
ف	Fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	Ha	h	-
ء	hamzah		(apostrof) tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya'	y	-

Data Diri

Nama	: Muhamad Ridwan
Tempat, TglLahir	: Sukabumi 05 Mei 1985
JenisKelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Kawin
AlamatSekarang	: Desa Kendayakan Blok C RT 10 RW 03 Teiri , Kab. Indramayu 45262
Telephone	: 085314874733/08112405585
Email	: gibranswaffa@gmail.com



PENDIDIKAN

1993 – 1998	SD Negeri Kendayakan III
1998 – 2001	MTs N Terisi
2001 – 2004	MAN I Indramayu
2004 – 2007	Universitas Wiralodra Indramayu

PENGALAMAN KERJA

KUA Gantar Indramayu 2007 – 2010
Sebagai Staf Administrasi KUA Gantar Indramayu

Badan Nasional Terorisme (BNPT) 2014 – 2018
Sebagai Staf Khusus Deputi III

KEMAMPUAN

Komputerisasi
Microsoft Office Word, Exel, Power Point, Access & Outlook

Associate in Graphic Design
Bahasa Indonesia (Aktif), Inggris (Pasif)